

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	SUARA PEMBARUAN	5	05-08-2002

Potensi Migas Sumut Lebih Dinikmati Aceh

JAKARTA = Potensi minyak dan gas bumi (migas) Sumatra Utara (Sumut) hingga kini lebih dinikmati oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hal itu terjadi karena pengelolaan produksi minyak masuk dalam wilayah aset NAD meskipun secara administratif, sumber minyak itu berada pada wilayah Sumut.

"Kami meminta keadilan kepada pemerintah pusat agar kebijakan perminyakan ini diubah. Dengan demikian, masyarakat Sumut dapat menikmati hasil buminya sendiri," kata Gubernur Sumut T Rizal Nurdin, pada pertemuannya dengan para anggota DPR RI asal provinsi itu di Jakarta pekan lalu.

Masalahnya, katanya, hingga kini empat lapangan minyak, yaitu Serang Jaya, Parapen, Kuala Dalam, dan Sungai Buluh, serta sebagian lapangan Kuala Simpang Timur di wilayah administratif Sumut, pengelolaan hasil migasnya justru masuk dalam Aset-I Rantau-Aceh Timur.

Produksi dari kelima lapangan tersebut dikirim dan dikumpulkan pada stasiun pengumpulan bersamaan dengan produksi dua lapangan di NAD, yaitu di lapangan Rantau-Aceh Timur itu. "Hal ini sangat merugikan kami, karena pencampuran/penggabungan hasil minyak dari dua provinsi justru terkonsentrasi di NAD, sehingga sumbangannya untuk Sumut sangat kecil," katanya tanpa memerinci angkanya.

Dikatakan, upaya penyelesaian masalah lapangan minyak yang berproduksi di daerah perbatasan Aceh, Gubernur Sumut telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Dalam Negeri.

Diusulkan, agar Pusat Operasional Pertamina DOH NAD-Sumbagut dikembalikan ke Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumut, seperti sediakala.

Selain itu, perlu diberikan kewenangan dekonsentrasi terhadap kegiatan pengawasan produksi, pelaksanaan *community development*, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemantauan pendistribusian BBM. "Tetapi sayangnya, usulan kami ditolak oleh Menteri ESDM melalui suratnya bulan April lalu. Alasannya, pemindahan itu memerlukan biaya yang tinggi serta kegiatan migas bersifat strategis sehingga belum sepenuhnya dapat didekonsentrasikan," ujar Rizal Nurdin.

Selain itu, Kota Binjai juga selama lebih dari enam tahun secara kontinyu memproduksi minyak dan gas bumi melalui lapangan minyak Wampu. Tetapi, dari tahun 2001 hingga 2002 belum dimasukkan sebagai daerah penghasil migas.

Masalah lainnya katanya, Kabupaten Deli Serdang tahun 2001 melalui SK Menteri ESDM tentang Penetapan Daerah Penghasil Migas, ditetapkan sebagai salah satu daerah penghasil gas bumi. Namun, pada tahun 2002 melalui SK Menteri ESDM, Deli Serdang tidak ditetapkan sebagai daerah penghasil.

"Kondisi ini disebabkan laporan dari Direktur Hulu Pertamina tidak mencantumkan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah penghasil migas," katanya. Dari peninjauan lapangan diketahui lapangan dimaksud masing-masing berada di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang dengan status produksi minyak/gas bumi. (N-6)